

PENYUSUNAN SKALA PRIORITAS PENGEMBANGAN LAHAN PERMUKIMAN BARU DI KABUPATEN BANTUL BERBANTUAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI

ARRANGE THE NEW SETTLEMENT LAND DEVELOPMENT PRIORITY IN BANTUL REGENCY ASSISTED BY GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM

Oleh: Titin Lorenza Barus, Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, e-mail: titinlorenza@yahoo.com

ABSTRAK

Informasi mengenai prioritas lahan yang sesuai untuk dikembangkan menjadi lahan permukiman sangat dibutuhkan di Kabupaten Bantul mengingat lokasinya yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menyusun skala prioritas lahan yang sesuai untuk dikembangkan menjadi lahan permukiman baru di Kabupaten Bantul, (2) mengetahui pola persebaran lahan yang diprioritaskan untuk dikembangkan menjadi lahan permukiman baru di Kabupaten Bantul, dan (3) Mengetahui tingkat kesesuaian RTRW Tahun 2010-2030 dengan Prioritas Pengembangan Lahan Permukiman Baru di Kabupaten Bantul.

Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan desain deskriptif kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah 9 klasifikasi satuan unit lahan yang terdiri dari 1.102 area yang dihasilkan dari *overlay* peta penggunaan lahan dan peta kemiringan lahan. Uji akurasi dilakukan dengan mengambil sampel berdasarkan perhitungan Fitzpatrick Lins dimana tingkat ketelitian sebesar 85% dan tingkat kesalahan 10%. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) kemiringan lahan, (2) penggunaan lahan, (3) kedalaman air tanah, (4) drainase permukaan, dan (5) kerawanan bencana. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) interpretasi peta, (2) observasi, dan (3) dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah: (1) pengharkatan, (2) pembobotan, (3) *overlay*, (4) interpolasi, dan (5) analisis tetangga terdekat.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) prioritas satu memiliki luas 479,46 ha, prioritas dua memiliki luas 10.559,22 ha, prioritas tiga memiliki luas 11.344,57 ha, dan tidak diprioritaskan menjadi permukiman baru adalah seluas 29.049,93 ha. (2) Lahan Prioritas Satu memiliki pola acak di setiap kecamatan kecuali Kecamatan Sedayu, Prioritas dua memiliki pola mengelompok di Kecamatan Sedayu, Pajangan, Pandak, Srandakan, Sanden, Kretek, Imogiri, Dlingo dan Piyungan, Prioritas tiga memiliki pola mengelompok di Kecamatan Sedayu, Pajangan, Kasihan, Kretek, Pundong, Imogiri, Dlingo, Pleret, dan Piyungan, dan lahan yang tidak diprioritaskan untuk dikembangkan menjadi permukiman baru memiliki pola mengelompok di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Pajangan. (3) Dari rencana kawasan permukiman RTRW tahun 2010-2030, seluas 10.225,24 ha sesuai dengan lokasi prioritas pengembangan lahan permukiman baru dan seluas 5.390,12 ha tidak sesuai.

Kata kunci: prioritas, permukiman baru, Kabupaten Bantul

ABSTRACT

The information about land's priority which is decent to be developed into a settlement land is really needed in Bantul Regency considering its location that is border to Yogyakarta City. The aim of this research is to: (1) organize land's priority scale that is decent to be developed into new settlement land in Bantul Regency, (2) find out the pattern of land distribution which is a priority to be developed into a new settlement land in Bantul Regency, and (3) find out the conformity level of RT/RW in the year 2010-2030 with New Settlement Land Development Priorities in Bantul Regency.

This is a population research using descriptive quantitative design. The population used in this study were 9 classifications of units of land which consist 1.102 lands taken from overlay of land usage map and land slope map. The accuracy test was done by taking samples using Fitzpatrick Lins calculation with accuracy level 85% and error level 10%. Variables used in this research were: (1) land slope, (2) land usage, (3) groundwater depth, (4) surface drainage, and (5) disaster vulnerability. The data collection techniques used were: (1) map interpretation, (2) observation, and (3) documentation, while the data analysis techniques used were: (1) scoring, (2) weighting, (3) overlay, (4) interpolating, and (5) nearest neighbor analysis.

The results of this research are: (1) priority 1's width is 479,46 ha, priority 2's width is 10.559,22 ha, priority 3's width is 11.344,57 ha, and the width of the land that is not a priority to be used as new settlement is 29.049,93 ha. (2) The first priority has random pattern in each district except for District Sedayu, second priority has group pattern in Sedayu District, Pajangan, Pandak, Srandakan, Sanden, Kretek, Imogiri, Dlingo and Piyungan, third priority has group pattern in Sedayu District, Pajangan, Kasihan, Kretek, Pundong, Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, and land that is not a priority to be developed into new settlement has group pattern in each district except for Pajangan District. (3) From the planning of RTRW settlement land in the year of 2010-2030, 10.225,24 ha is suit the location of new settlement area development priorities and of 5.390,12 ha is not suitable.

Keywords: priority, new settlement, Bantul Regency

PENDAHULUAN

Manusia memiliki tiga kebutuhan utama yang harus dipenuhi, yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal). Ketiganya disebut juga dengan kebutuhan primer, artinya kebutuhan yang pemenuhannya diutamakan terlebih dahulu. Tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan primer manusia di samping makanan dan pakaian. Tempat tinggal memiliki fungsi

sebagai tempat melindungi diri dari bahaya dari lingkungan sekitar.

Pemenuhan kebutuhan manusia akan permukiman memiliki banyak permasalahan baik yang berkaitan dengan keberagaman wilayah maupun keberagaman dinamika penduduknya. Permasalahan permukiman menjadi semakin kompleks, terutama di negara-negara berkembang karena masalah permukiman satu akan disusul dengan

permasalahan permukiman lainnya. Penurunan kualitas permukiman, penurunan kualitas lingkungan, munculnya kawasan permukiman kumuh adalah beberapa permasalahan yang berkaitan erat dengan krisis permukiman. Permasalahan permukiman ini akan selalu ada selama manusia masih memiliki keinginan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik (Hadi Sabari Yunus, 2007: 2-3).

Masalah permukiman di Indonesia banyak disebabkan oleh pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak merata. Pertambahan penduduk berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan permukiman. Kebutuhan akan permukiman yang mendesak mengakibatkan banyak masyarakat memutuskan untuk bermukim di kawasan padat penduduk. Kondisi ini tentu mengakibatkan kawasan permukiman menjadi tidak nyaman saat ditempati karena *overpopulated*.

Kabupaten Bantul terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DI Yogyakarta) dan berbatasan langsung dengan Kota Yogyakarta. Pesatnya perkembangan yang terjadi di Kota Yogyakarta menjadikan Kabupaten Bantul juga terkena dampaknya, salah satunya adalah pertambahan jumlah

penduduk. Kabupaten Bantul sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 947.066 jiwa pada tahun 2013 (BPS, 2015). Dari tahun ke tahun Kabupaten Bantul berada di urutan kedua yang memiliki jumlah penduduk terbesar setelah Kabupaten Sleman. Tahun 2009 Kabupaten Bantul memiliki jumlah penduduk sebesar 876.172 jiwa. Jumlah ini mengalami pertambahan di setiap tahunnya dan dalam kurun waktu lima tahun, pada tahun 2013 Kabupaten Bantul memiliki penduduk sejumlah 947.066 jiwa.

Pertambahan jumlah penduduk tentu memicu bertambahnya kebutuhan akan permukiman. Ketersediaan permukiman yang cukup harus menjadi perhatian yang serius. Lokasi kawasan permukiman tahun 2010-2030 telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul. RTRW ini mengatur pemanfaatan ruang yang ada, hanya saja, hingga saat ini belum diketahui lahan yang diprioritaskan untuk pendirian kawasan permukiman. Prioritas pengembangan lahan permukiman ini perlu untuk diketahui agar tidak menyebabkan perkembangan permukiman liar dan permbangunan permukiman di kawasan yang tidak seharusnya.

Lokasi pembangunan permukiman baru disusun dengan melihat beberapa aspek, salah satunya adalah kualitas lahan dan aspek mitigasi bencana. Longsor dan banjir merupakan salah satu bencana yang kerap melanda dan sekaligus merugikan masyarakat. Dampaknya selain dapat mengganggu kenyamanan rumah, juga dapat menimbulkan kerugian berupa harta, benda, dan nyawa.

Longsor dan banjir merupakan bencana yang kerap melanda Kabupaten Bantul. Pendirian lokasi permukiman baru di kawasan rawan bencana longsor dan banjir tentu saja akan mengganggu kenyamanan dan keamanan tempat tinggal, selain itu juga akan menambah anggaran biaya baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri baik untuk biaya perbaikan hingga relokasi rumah.

Pemilihan lokasi permukiman yang tepat perlu diperhatikan karena memiliki arti penting dalam aspek keruangan, seperti dampak terhadap lingkungan, keawetan bangunan, meminimalisir risiko bencana, dan sebagainya. Data penentuan variasi prioritas lahan untuk dikembangkan menjadi permukiman nantinya diolah menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) untuk mendapatkan informasi

mengenai karakteristik lahan yang sesuai untuk lahan permukiman baru di Kabupaten Bantul. Analisis SIG digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi dan sebaran prioritas pengembangan lahan permukiman baru di Kabupaten Bantul. Penggunaan SIG digunakan agar penelitian yang dilakukan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan fenomena yang telah dijabarkan di atas, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “Penyusunan Skala Prioritas Pengembangan Lahan Permukiman Baru Di Kabupaten Bantul Berbantuan Sistem Informasi Geografi”. Penelitian ini perlu dilakukan mengingat dampaknya yang sangat besar. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, permasalahan mengenai permukiman di Kabupaten Bantul dapat diminimalisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk menyusun skala prioritas lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi permukiman baru. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder serta memanfaatkan analisa SIG. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif disini digunakan untuk

menguraikan fakta-fakta dari obyek yang diteliti dalam bentuk gambar, peta, foto, tabel, analisis, pembahasan, ataupun berupa kesimpulan. Analisis kuantitatif digunakan dari pengumpulan data hingga penelitian dengan menggunakan angka dalam analisis dan penyajiannya.

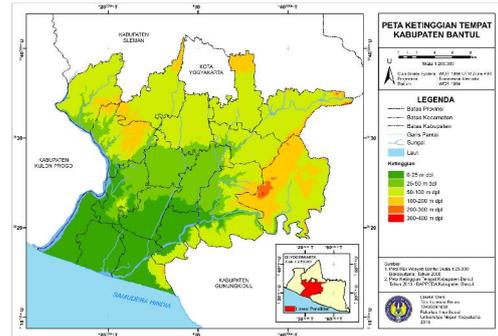
Analisis yang dilakukan di dalam penelitian ini menggunakan bantuan teknologi SIG. Analisis SIG digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi dan sebaran lahan prioritas pengembangan permukiman baru di Kabupaten Bantul. Analisis SIG dalam penelitian ini menggunakan metode pengharkatan pada data parameter dan dipadukan dengan teknik *overlay*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

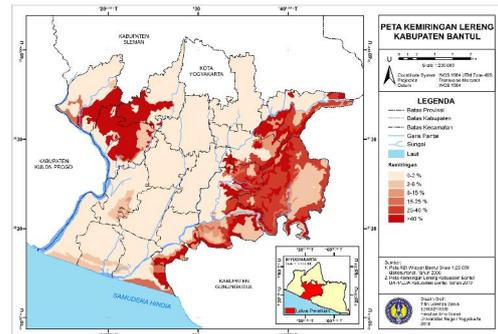
A. Deskripsi Daerah Penelitian

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terletak di bagian paling selatan. Jarak lurus Kabupaten Bantul dengan ibukota provinsi adalah 12 km. Secara astronomis, Kabupaten Bantul terletak di antara 91122387-9141468 mT dan 412134-447247 mU. Panjang Kabupaten Bantul dari ujung utara ke selatan adalah 28,62 km, sedangkan panjang dari ujung timur ke barat adalah 35,09 km.

Ketinggian wilayah di Kabupaten Bantul berkisar antara 0 sampai dengan 400 meter di atas permukaan laut (m dpl). Kabupaten Bantul memiliki kemiringan lereng yang bervariasi, mulai dari 0->30%.



Gambar 1. Peta Ketinggian Tempat

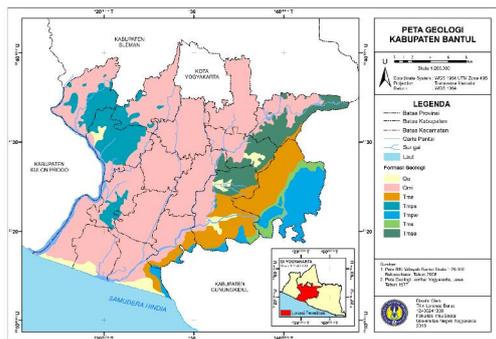


Gambar 2. Peta Kemiringan Lereng

Rata-rata setiap tahunnya Kabupaten Bantul memiliki 5,9 bulan basah, 5 bulan kering, dan 1,1 bulan sedang. Jika diklasifikasikan kedalam iklim Schmidt Ferguson, Kabupaten Bantul termasuk kedalam Tipe Iklim C dengan kondisi iklim sedang.

Kondisi geologi menggambarkan batuan penyusun daerah penelitian. Berdasarkan Peta Geologi Lembar

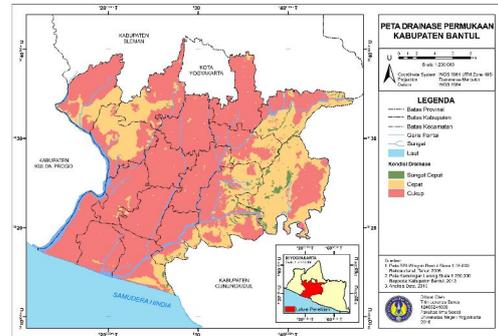
Yogyakarta, Jawa yang diterbitkan Direktorat Geologi tahun 1977, diketahui bahwa Kabupaten Bantul terdiri dari batuan yang terbentuk pada zaman kuarter dan tersier. Formasi yang terbentuk pada zaman kuarter adalah endapan Vulkanik Merapi Muda (Qmi) dan formasi batuan yang terbentuk dari zaman tersier adalah Formasi Nglanggeran (Tmn), Formasi Sentolo (Tmps), Formasi Wonosari (Tmpw), Formasi Sambipitu (Tms), dan Formasi Semilir (Tmse).



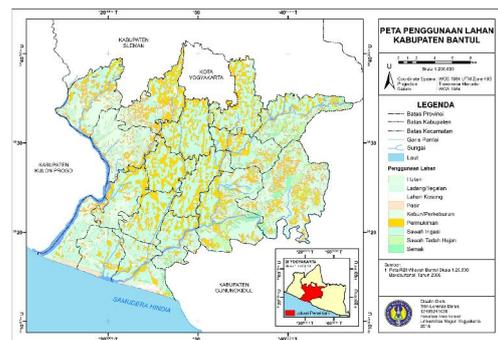
Gambar 3. Peta Geologi

Drainase permukaan berkaitan erat dengan kemiringan lahan, penggunaan lahan, curah hujan, tekstur, struktur, dan jenis tanah. Secara umum, Kabupaten Bantul memiliki kondisi drainase yang cukup baik karena itu kondisi drainase permukaan Kabupaten Bantul diklasifikasikan kedalam kelas Pengaturan Cukup, Cepat, dan Sangat Cepat. Berdasarkan Peta RBI, Kabupaten Bantul memiliki 9 klasifikasi

penggunaan lahan, yaitu hutan, ladang/tegalan, lahan kosong, pasir, kebun/perkebunan, permukiman, sawah irigasi, sawah tadah hujan, dan semak.

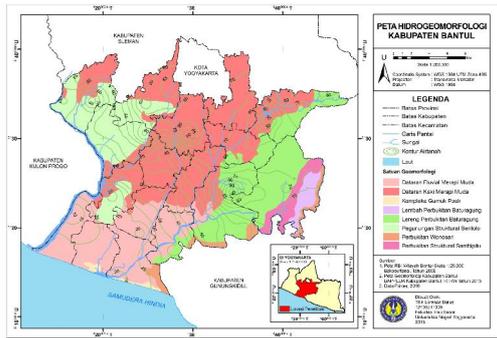


Gambar 4. Peta Drainase Permukaan

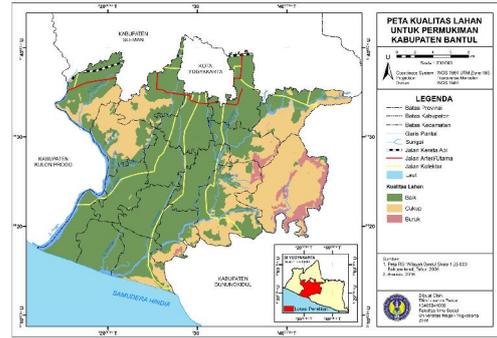


Gambar 5. Peta Penggunaan Lahan

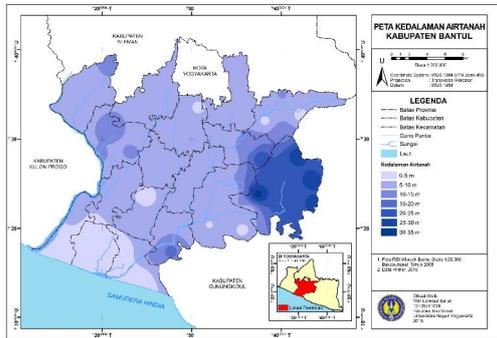
Secara umum kondisi kedalaman airtanah di Kabupaten Bantul cukup baik karena mudah diakses kecuali di bagian timur. Kualitas lahan untuk permukiman berpengaruh terhadap keamanan dan kenyamanan bangunan untuk tempat tinggal. Kualitas lahan yang baik untuk didirikan sebagai permukiman tentunya memiliki kelebihan-kelebihan yang juga dapat berpengaruh terhadap ketahanan bangunan.



Gambar 6. Peta Hidrogeomorfologi



Gambar 8. Peta Kualitas Lahan untuk Permukiman



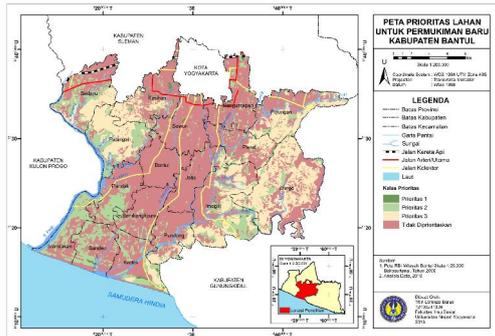
Gambar 7. Peta Kedalaman Airtanah

Sedangkan untuk kualitas lahan yang lebih rendah memiliki beberapa ancaman baik terhadap penghuni rumah maupun ketahanan bangunan rumah tersebut. Untuk itu, sebaiknya pembangunan permukiman dilakukan di kawasan yang memiliki kualitas lahan yang baik untuk permukiman. Apabila pembangunan permukiman tidak memungkinkan untuk dilakukan di kawasan yang baik, maka lahan dengan kualitas cukup dapat menjadi solusi.

B. Prioritas Pengembangan Lahan untuk Permukiman Baru

Prioritas pengembangan lahan permukiman ini diklasifikasikan menjadi 4, yaitu prioritas satu, prioritas dua, prioritas tiga, dan tidak diprioritaskan. Lahan dengan prioritas satu artinya, wilayahnya berupa lahan yang diutamakan untuk permukiman dan memiliki kualitas lahan yang baik untuk permukiman. Untuk lahan prioritas dua artinya wilayah tersebut dapat dikembangkan sebagai permukiman dengan beberapa kendala, seperti kualitas lahan yang tidak terlalu sesuai untuk permukiman atau harus mengorbankan beberapa lahan produktif. Untuk prioritas tiga, permukiman dapat didirikan dengan konsekuensi berada di wilayah dengan kualitas lahan yang tidak terlalu sesuai untuk permukiman dan mengorbankan lahan produktif. Untuk

lahan yang tidak diprioritaskan untuk permukiman baru artinya wilayahnya memiliki lahan yang tidak diutamakan dan kualitas lahan yang buruk untuk dikembangkan sebagai permukiman baru.



Gambar 9. Peta Prioritas Lahan untuk Permukiman Baru

Lahan dengan prioritas satu terdapat seluas 479,46 ha. Lahan prioritas dua memiliki luas 10.559,22 ha. Lahan prioritas dua cukup luas dikarenakan banyak lahan yang memiliki kualitas baik untuk dikembangkan sebagai permukiman. Lahan prioritas tiga memiliki luas 11.344,57 ha. Lahan yang tidak diprioritaskan menjadi permukiman baru adalah seluas 29.049,93 ha. Luas lahan yang tidak diprioritaskan untuk dibangun permukiman baru adalah yang paling luas karena meskipun sebagian besar wilayah di Kabupaten Bantul memiliki kualitas lahan yang baik, namun banyak lahannya yang tidak diutamakan menjadi

permukiman baru karena berada di daerah permukiman dan sawah irigasi. Kategori lahan tidak diprioritaskan menjadi permukiman baru paling luas terdapat di Kecamatan Sewon, yaitu 2.594,50 ha. Kecamatan Sewon, sebenarnya memiliki kualitas lahan yang baik untuk didirikan permukiman. Hanya saja, penggunaan lahan Kecamatan Sewon yang didominasi oleh permukiman dan sawah irigasi menyebabkan kecamatan ini tidak diutamakan untuk dikembangkan menjadi permukiman baru. Untuk kategori lahan tidak diprioritaskan menjadi permukiman baru yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Pajangan dengan luas 516,17 ha.

Tabel 1. Luas Prioritas Lahan

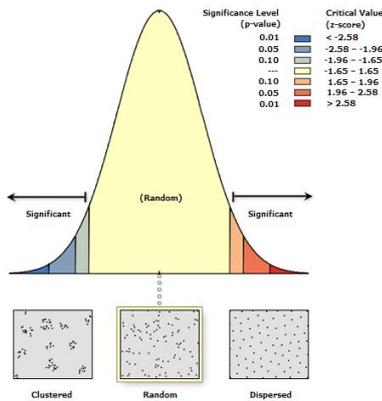
Prioritas	Luas (ha)
1	479,46
2	10.559,22
3	11.344,57
0	29.049,93
Jumlah	51.433,17

Sumber: Analisis Data, 2016

C. Pola Persebaran Prioritas Lahan Permukiman Baru

Persebaran obyek dapat diketahui dengan melihat nilai T atau pada *tool Average Neighbor Analysis* dapat dilihat dari nilai *Nearest Neighbor Ratio*. Dari hasil analisis tetangga terdekat, diketahui

bahwa lahan Prioritas satu memiliki pola persebaran yang acak di setiap kecamatan di Kabupaten Bantul kecuali Kecamatan Sedayu. Hal ini dapat dilihat dari nilai rasio tetangga terdekat sebesar 0,98 pada tabel *Average Nearest Neighbor Summary*. Sedangkan untuk nilai probabilitasnya adalah 0,86 dengan uji signifikansi sebesar -0,17. Lahan Prioritas satu memiliki persebaran yang acak dikarenakan penggunaan lahan yang diutamakan untuk didirikan permukiman seperti lahan kosong dan semak tidak tersebar secara merata di Kabupaten Bantul.



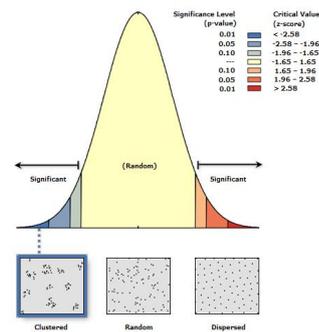
Gambar 10. Analisis Tetangga Terdekat Lahan Prioritas satu

Tabel 2. Analisis Tetangga Terdekat Lahan Prioritas satu

Average Nearest Neighbor Summary	
Observed Mean Distance :	2380,706390 Meters
Expected Mean Distance :	2433,994471 Meters
Nearest Neighbor Ratio :	0,978107
z-score :	-0,172689
p-value :	0,862896

Sumber: Analisis Data, 2016

Lahan Prioritas dua memiliki pola persebaran yang mengelompok di Kecamatan Sedayu, Pajangan, Pandak, Srandakan, Sanden, Kretek, Imogiri, Dlingo dan Piyungan. Hal ini dapat dilihat dari nilai rasio tetangga terdekat sebesar 0,54 pada tabel *Average Nearest Neighbor Summary*. Sedangkan untuk nilai probabilitasnya adalah 0 dengan uji signifikansi sebesar -6,45. Prioritas dua memiliki persebaran yang mengikuti kualitas dan keutamaan lahan yang cukup baik tersebar secara mengelompok di Kabupaten Bantul.



Gambar 11. Analisis Tetangga Terdekat Lahan Prioritas dua

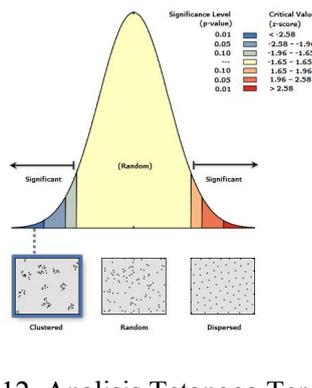
Tabel 3. Analisis Tetangga Terdekat Lahan Prioritas dua

Average Nearest Neighbor Summary	
Observed Mean Distance :	742,464169 Meters
Expected Mean Distance :	1382,907947 Meters
Nearest Neighbor Ratio :	0,536886
z-score :	-6,449953
p-value :	0

Sumber: Analisis Data, 2016

Lahan Prioritas tiga memiliki pola persebaran yang mengelompok di Kecamatan Sedayu, Pajangan, Kasihan,

Kretek, Pundong, Imogiri, Dlingo, Pleret, dan Piyungan. Hal ini dapat dilihat pada tabel *Average Nearest Neighbor Summary*. Nilai rasio tetangga terdekat yang dimiliki lahan Prioritas tiga adalah sebesar 0,54 Sedangkan untuk nilai probabilitasnya adalah 0 dengan uji signifikansi sebesar -6,45. Lahan Prioritas tiga memiliki persebaran yang mengelompok dikarenakan kualitas lahan yang cukup baik hingga baik dan keutamaan lahan sedang cukup banyak terdapat di beberapa tempat.



Gambar 12. Analisis Tetangga Terdekat Lahan Prioritas tiga

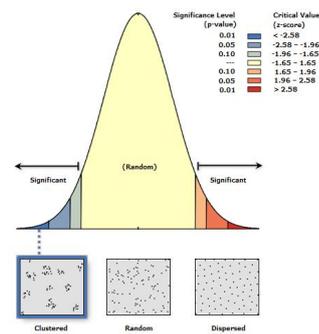
Tabel 4. Analisis Tetangga Terdekat Lahan Prioritas tiga

Average Nearest Neighbor Summary	
Observed Mean Distance :	399,385565 Meters
Expected Mean Distance :	1086,273064 Meters
Nearest Neighbor Ratio :	0,367666
z-score :	-13,251594
p-value :	0

Sumber: Analisis Data, 2016

Lahan yang tidak diprioritaskan untuk dikembangkan menjadi permukiman baru memiliki pola persebaran yang mengelompok di

seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Pajangan. Hal ini dapat dilihat pada tabel *Average Nearest Neighbor Summary*. Nilai rasio tetangga terdekat yang dimiliki adalah sebesar 0,41 Sedangkan untuk nilai probabilitasnya adalah 0 dengan uji signifikansi sebesar -11,57. Lahan tidak diprioritaskan memiliki persebaran yang mengelompok dikarenakan penggunaan lahan yang tidak diutamakan untuk dijadikan permukiman, seperti sawah irigasi, pasir, dan permukiman banyak terdapat di Kabupaten Bantul.



Gambar 13. Analisis Tetangga Terdekat Lahan Tidak Diprioritaskan

Tabel 5. Analisis Tetangga Terdekat Lahan Tidak Diprioritaskan

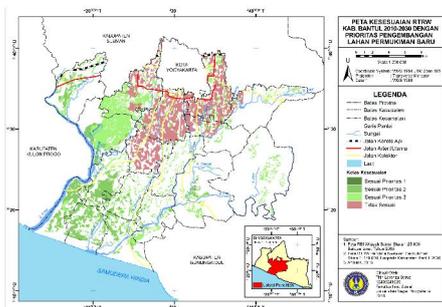
Average Nearest Neighbor Summary	
Observed Mean Distance :	499,309918 Meters
Expected Mean Distance :	1217,721759 Meters
Nearest Neighbor Ratio :	0,410036
z-score :	-11,565141
p-value :	0

Sumber: Analisis Data, 2016

D. Kesesuaian RTRW dengan Prioritas Pengembangan Lahan Permukiman Baru

RTRW Kabupaten Bantul disusun pada tahun 2010 dan berlaku hingga tahun 2030. RTRW berfungsi untuk menjadi pedoman pembangunan di akan dilakukan Kabupaten Bantul agar pelaksanaannya menjadi lebih optimal. RTRW Kabupaten Bantul juga mengatur mengenai rencana kawasan lokasi permukiman di Kabupaten Bantul. Luas kawasan permukiman baru pada Peta Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul tahun 2010-2030 adalah seluas 15.615,36 ha.

permukiman baru, seluas 10.224,24 sesuai dengan peta prioritas dibuat, dengan rincian 41,13 ha pada prioritas satu, 3.552,10 ha pada prioritas dua, dan 6.632,01 ha pada prioritas tiga. Sedangkan rencana permukiman baru yang tidak sesuai dengan peta prioritas yang telah dibuat adalah seluas 5.390,12 ha. Sebagian besar lahan yang tidak sesuai dengan prioritas pengembangan lahan permukiman merupakan sawah irigasi. Pembangunan permukiman yang menghilangkan sawah irigasi merupakan tindakan yang dilarang oleh pemerintah karena dapat mengancam kelangsungan pangan masyarakat.



Gambar 14. Peta Kesesuaian RTRW dengan Prioritas Pengembangan Lahan Permukiman Baru

Tabel 6. Kesesuaian RTRW dengan Prioritas Lahan Pengembangan Permukiman Baru

Prioritas	Sesuai (ha)			Tidak Sesuai (ha)
	Prioritas satu	Prioritas dua	Prioritas tiga	
	41,13	3.552,10	6.632,01	5.390,12
	10.225,24			5.390,12

Sumber: Analisis Data, 2016

Dari luas keseluruhan lahan yang direncanakan untuk pembangunan

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prioritas lahan yang sesuai untuk dikembangkan menjadi permukiman baru di Kabupaten Bantul terbagi kedalam 4 kelas yaitu, prioritas satu, 2, 3, dan kelas tidak diprioritaskan. Prioritas satu memiliki luas 479,46 ha, lahan dengan prioritas dua memiliki luas 10.559,22 ha, lahan prioritas tiga memiliki luas 11.344,57 ha, dan lahan yang tidak diprioritaskan menjadi permukiman baru adalah seluas 29.049,93 ha.

2. Persebaran lahan Prioritas satu memiliki pola persebaran yang acak di setiap kecamatan di Kabupaten Bantul kecuali Kecamatan Sedayu, lahan Prioritas dua memiliki pola persebaran yang mengelompok di Kecamatan Sedayu, Pajangan, Pandak, Srandakan, Sanden, Kretek, Imogiri, Dlingo dan Piyungan, lahan Prioritas tiga memiliki pola persebaran yang mengelompok di Kecamatan Sedayu, Pajangan, Kasihan, Kretek, Pundong, Imogiri, Dlingo, Pleret, dan Piyungan, sedangkan lahan yang tidak diprioritaskan untuk dikembangkan menjadi permukiman baru memiliki pola persebaran yang mengelompok di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Pajangan.
3. Rencana Kawasan Permukiman Baru Kabupaten Bantul tahun 2010-2030 adalah seluas 15.615,36 ha. Seluas 10.224,24 sesuai dengan peta prioritas dibuat, dengan rincian 41,13 ha pada prioritas satu, 3.552,10 ha pada prioritas dua, dan 6.632,01 ha pada prioritas tiga. Sedangkan rencana permukiman baru yang tidak sesuai dengan peta prioritas yang telah dibuat adalah seluas 5.390,12 ha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis merekomendasikan saran-saran berikut.

1. Bagi Pengembang

Pengembangan permukiman baru sebaiknya dilakukan pada lahan prioritas satu. Apabila pembangunan permukiman tidak dimungkinkan pada lahan prioritas satu, pengembangan dapat dilakukan pada prioritas dua atau 3. Pengembangan permukiman baru yang dilakukan pada kawasan yang tidak diprioritaskan dapat mengurangi kenyamanan dan keamanan tempat tinggal, bahkan dapat menimbulkan permasalahan lingkungan baru.

2. Bagi Pemerintah

RTRW Rencana Kawasan Permukiman tahun 2010-2030 perlu ditinjau ulang karena masih banyak kawasan permukiman yang direncanakan terletak pada lahan yang tidak diprioritaskan.

3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya prioritas pengembangan lahan permukiman baru di Kabupaten Bantul, masyarakat diharapkan ikut mengawasi pembangunan

permukiman baru yang ada di Kabupaten Bantul agar berada di kawasan yang diprioritaskan.

4. Bagi Peneliti

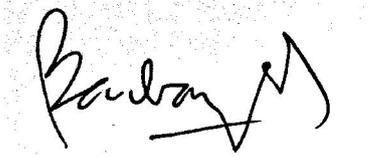
Penelitian ini mencakup wilayah yang luas, perlu adanya penyempitan lokasi penelitian agar hasilnya lebih detail. Disamping itu, penelitian ini belum menggunakan variabel sarana dan prasarana. Diharapkan pada penelitian selanjutnya variabel tersebut dapat dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

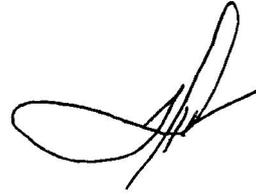
- Eddy Prahasta. 2009. *Sistem Informasi Geografis: Konsep-konsep Dasar (Perspektif Geodesi dan Geomatika)*. Bandung: Informatika.
- Eko Budihardjo. 1984. *Sejumlah Permasalahan Permukiman Kota*. Bandung: Alumni.
- Gabler, Robert E., et all. 2009. *Physical Geography, 9th Edition*. Canada: Brooks/Cole.
- Kartasapoetra. 2005. *Teknologi Konservasi Tanah dan Air*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kaslan A. Thohir. 1985. *Butir-butir Tata Lingkungan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Malingreau, J. P & Rosalia Christiani. 1982. *A Land Cover/ Land Use Classification for Indonesia*. Yogyakarta: Puspics UGM.
- Nursid Sumaatmaja. 1981. *Studi Geografi: Suatu Pendekatan dan Analisa Keruangan*. Bandung: Alumni
- Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 41 Tahun 2007 mengenai Pedoman Teknis Kawasan Budi Daya.
- Su Ritohardoyo. 2013. *Penggunaan dan Tata Guna Lahan*. Ombak: Yogyakarta.
- Suparmini & Bambang Syaeful Hadi. 2009. *Dasar-Dasar Geografi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial UNY.
- Tjuk Kuswartojo, dkk. 2005. *Perumahan dan Permukiman di Indonesia*. Bandung: Penerbit ITB.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Yogyakarta, 16 Agustus 2016

Reviewer



Bambang Syaeful Hadi, M. Si
NIP. 19710814 1999031 004



Suhadi Purwantara, M. Si
NIP. 19591129 198601 1 001